

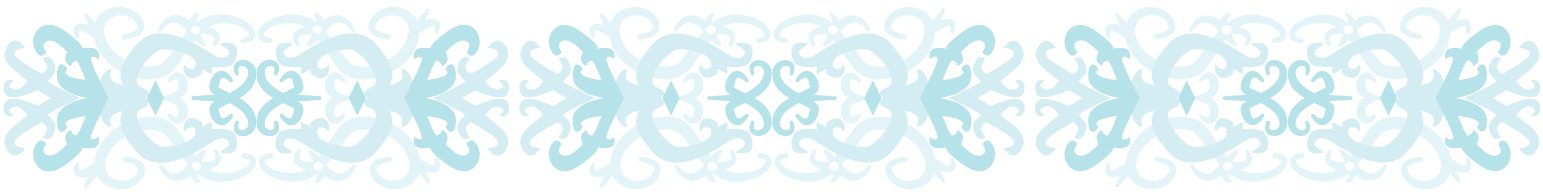
MEMBANGUN DATA BERBASIS BUKTI

Menuju Kalimantan Utara Maju, Makmur, dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sadar bahwa data harus disatukan dan diseragamkan agar cara kerja pemerintah lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Kami ingin program Satu Data menyediakan data yang akurat, mudah dicari, dan berguna bagi semua, terutama untuk membuat rencana dan anggaran daerah.

*(Gubernur Kalimantan Utara,
Dr. H. Zainal A. Paliwang)*





Pembangunan yang efektif dimulai dari data. Perencanaan dan kebijakan yang didukung ketersediaan data akurat dan terintegrasi akan lebih tepat menjawab kebutuhan masyarakat. Data yang lengkap dan terkelola dengan baik membuat arah pembangunan lebih terfokus serta berbasis bukti nyata.

Urgensi inilah yang mendorong pemerintah pusat menerbitkan berbagai regulasi penting, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian diperkuat oleh Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Regulasi ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan di Indonesia harus berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang efektif.

Substansi kebijakan ini adalah menciptakan sistem pengelolaan data pemerintah yang lebih baik dan terintegrasi: mulai dari penggunaan standar data yang seragam, penyusunan metadata yang jelas, kode referensi yang konsisten, hingga sistem yang saling terhubung (*interoperabilitas*). Dengan begitu, seluruh informasi pemerintah—baik di pusat maupun di daerah—dapat dimanfaatkan bersama untuk perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil pembangunan.

Meski demikian, mewujudkan tata kelola data yang lebih baik bukanlah hal mudah. Di banyak daerah, data masih tersebar di berbagai produsen dengan format berbeda, belum terstandarisasi, serta dikelola oleh sumber daya manusia yang terbatas. Tantangan lainnya, data yang sudah ada sering kali belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan. Hal ini menjadikan peran pemerintah daerah sangat penting untuk menjembatani tantangan sekaligus memastikan data benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Komitmen Kalimantan Utara: Dari Regulasi ke Aksi

Sebagai provinsi dengan kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kalimantan Utara (Kaltara) justru bergerak cepat memastikan pembangunan di wilayahnya semakin progresif dan tidak tertinggal. Sejak awal berdiri, Pemerintah Provinsi Kaltara menyadari bahwa pembangunan berkualitas hanya dapat ditopang oleh data yang terpercaya.

Komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai payung hukum tata kelola data. Selanjutnya, kelembagaan resmi Satu Data Daerah (SDD) Kaltara dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/173/2025.

Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menegaskan:

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sadar bahwa data harus disatukan dan diseragamkan agar cara kerja pemerintah lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Kami ingin program Satu Data menyediakan data yang akurat, mudah dicari, dan berguna bagi semua, terutama untuk membuat rencana dan anggaran daerah.”

Pernyataan ini menegaskan komitmen Kaltara untuk mewujudkan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based*), didukung data akurat dan terpercaya, sehingga tidak lagi bergantung pada asumsi.



Melahirkan Portal E-Dataku – Sidara Cantik 2.0

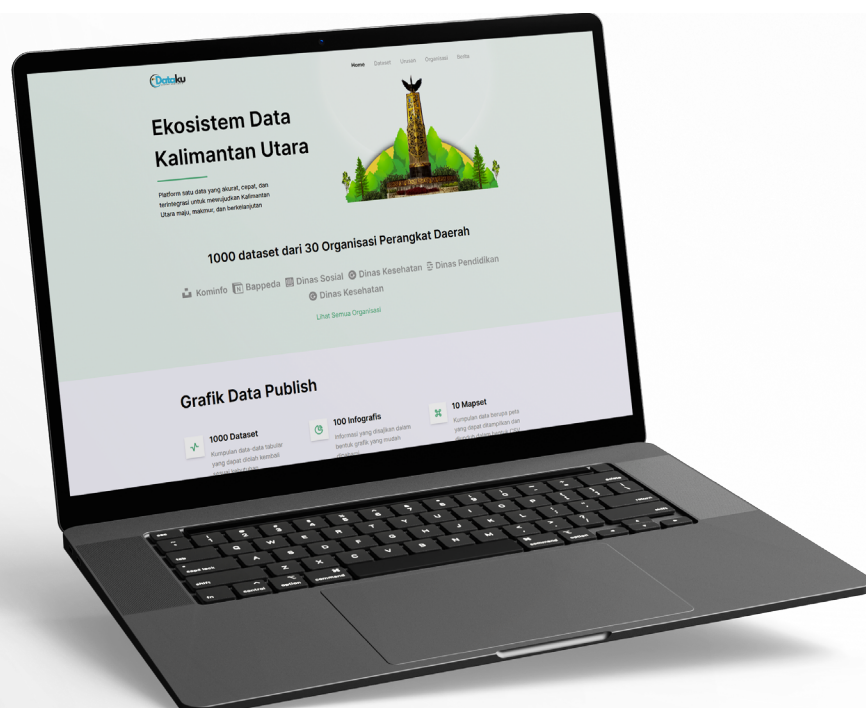
Salah satu tonggak penting perjalanan Satu Data Kaltara adalah peluncuran portal resmi E-Dataku – Sidara Cantik 2.0 pada 27 Mei 2025 di Tanjung Selor. Portal ini menjadi pusat integrasi data sektoral dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.

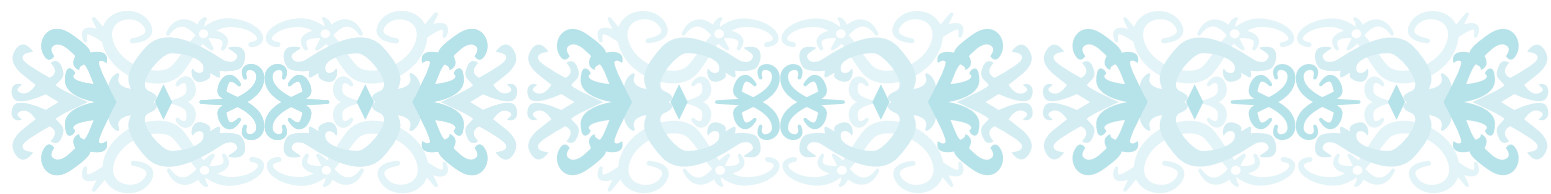
Peluncuran ini menunjukkan kesiapan Kaltara mewujudkan Satu Data Indonesia di Bumi Benuanta. Portal dikembangkan sebagai platform terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh publik—mulai dari pemerintah, akademisi, media, hingga masyarakat umum.

Dalam forum Satu Data Daerah, Pemprov Kaltara melalui Bappeda Litbang sebagai sekretariat, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (DKISP) sebagai wali data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, serta OPD selaku produsen data berhasil menetapkan 1.961 set data statistik sektoral tahun 2025. Seluruh data ini kemudian dikumpulkan, diverifikasi, dan disebarluaskan melalui portal E-Dataku Sidara Cantik 2.0. Dengan mekanisme ini, produk data terjamin kualitas dan akurasi, sekaligus mudah diakses dan dibagikan.

Kini, portal E-Dataku Sidara Cantik 2.0 menjadi wajah keterbukaan data Kaltara. Publik dapat mengakses berbagai informasi pembangunan, mulai dari data sosial-ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Ke depan, portal ini akan terus dikembangkan untuk mendukung ketersediaan data mikro dan spasial, serta integrasi dengan platform data nasional.

Implementasi Satu Data Kaltara diwujudkan melalui kolaborasi banyak pihak, termasuk dukungan tingkat nasional. Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya keterpaduan data daerah untuk menyukseskan penyusunan dokumen perencanaan. Kementerian Dalam Negeri menekankan perlunya penyelarasan data lintas daerah agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran.





Selain itu, **Program SKALA**, kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, juga turut berkontribusi. Dukungan SKALA tidak hanya berupa asistensi teknis, tetapi juga pendampingan siklus data, penguatan kapasitas SDM, hingga mendorong inklusivitas tata kelola data.

Hannah Derwent, *Counsellor for Human Development*, Kedutaan Besar Australia, menyampaikan saat peluncuran:

“Platform ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait Satu Data Indonesia. Program SKALA dengan bangga mendukung upaya ini untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau semua masyarakat.”

Kolaborasi lintas pihak inilah yang memperkuat langkah Kaltara, sehingga implementasi Satu Data tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar instrumen pembangunan yang esensial.

Beberapa capaian utama Satu Data Kaltara antara lain:

- **Integrasi data sektoral:** hampir dua ribu set data berhasil dihimpun dan diverifikasi.
- **Pelebagaan Forum Satu Data:** menjadi wadah koordinasi lintas instansi, membahas rencana aksi, daftar data prioritas, hingga isu strategis.
- **Portal publik:** kehadiran E-Dataku Sidara Cantik 2.0 memperluas akses masyarakat terhadap data pembangunan.
- **Transparansi dan akuntabilitas:** publik kini lebih mudah mengakses informasi, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Capaian ini menjadi pijakan awal mendukung visi kepala daerah: “*Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.*” Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltara dalam mewujudkan misi pembangunan: “*Transformasi tata kelola data yang kolaboratif dan inovatif.*”

“Platform ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait Satu Data Indonesia. Program SKALA dengan bangga mendukung upaya ini untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau semua masyarakat.”

(Hannah Derwent, Counsellor for Human Development, Kedutaan Besar Australia)

Tantangan ke Depan

Meski banyak capaian, sejumlah tantangan masih perlu dijawab, antara lain:

- **Kualitas SDM pengelola data:** perlu ditingkatkan agar mampu mengelola dan menganalisis data sesuai standar.
- **Pemutakhiran berkelanjutan:** data harus diperbarui secara periodik agar relevan dengan dinamika pembangunan.
- **Pemanfaatan dalam kebijakan:** memastikan data digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program.
- **Kolaborasi lintas sektor:** keterlibatan kabupaten/kota di Kaltara masih perlu diperkuat agar integrasi data menyeluruh.
- **Literasi data publik:** mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengakses, tetapi juga memanfaatkan data dalam riset, advokasi, dan inovasi.

Jika tantangan ini dapat diatasi, Satu Data Kaltara akan semakin kokoh dan berdaya guna.

Kisah Kalimantan Utara membuktikan bahwa meskipun berstatus wilayah 3T, daerah ini mampu bergerak cepat membangun sistem data yang solid. Dengan regulasi yang jelas, dukungan kelembagaan, kolaborasi multipihak, dan komitmen pimpinan daerah, Satu Data Kaltara lahir bukan sekadar slogan, tetapi realitas.

Satu Data Kaltara dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Pesannya jelas: pembangunan berbasis bukti bisa diwujudkan dengan komitmen, kerja sama, dan sistem pendukung yang kuat. Data yang terbuka dan terintegrasi bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi bagi pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Seperti ditegaskan Gubernur Kaltara “Data bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk semua. Dengan data, kita bisa memastikan pembangunan menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.”

